

KEK

Vol 16 No 1
Tahun 2012

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- **Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan : Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia, 2005-2011**

- **Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Perpajakan (Studi Kasus pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus)**

- **Determinan Inflasi Regional Kota-kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2009**

- **Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea FTA (AKFTA) terhadap Indonesia dan Korea Selatan**

- **Pasar Modal dan Perekonomian Indonesia : Biaya Keterbukaan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Peran Pemodal Asing**

Kaj. Eko. & Keu.	Vol. 16	No. 1	Jakarta 2012	ISSN 1410-3249	Terakreditasi (No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI- LIP/08/2012)
------------------	---------	-------	--------------	----------------	---

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

KAJIAN

EKONOMI KEUANGAN



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI



**Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan :
Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Tercatat
Di Bursa Efek Indonesia, 2005-2011**



**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Perpajakan (Studi
Kasus pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus)**



**Determinan Inflasi Regional Kota-kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2000-2009**



**Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea *Free Trade Area*
(AKFTA) terhadap Indonesia dan Korea Selatan**



**Pasar Modal dan Perekonomian Indonesia : Biaya Keterbukaan,
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan Peran Pemodal
Asing**

KATA SAMBUTAN

Kami panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Kajian Ekonomi dan Keuangan edisi ini ke hadapan pembaca sekalian. Pada edisi ini, kami menyajikan berbagai topik yang berkaitan dengan analisis dan dampak kebijakan publik di bidang ekonomi dan keuangan negara.

Kajian pada volume kali ini diisi oleh berbagai topik tulisan yaitu Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan : Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia, 2005-2011; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Perpajakan (Studi Kasus pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus); Determinan Inflasi Regional Kota-kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2009; Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea FTA (AKFTA) terhadap Indonesia dan Korea Selatan, serta Pasar Modal dan Perekonomian Indonesia : Biaya Keterbukaan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan Peran Pemodal Asing. Adapun para penulis yang berkontribusi pada penerbitan kali ini yaitu Ansoriyah Fadilah, Herry Sumardjito, Arief Daryanto, Musa Hubeis, Eriyatno, Telisa Aulia Falianty, Luthfi Hanifah, Sigit Setiawan, Roy M. Manurung, Andriansyah, Bayu Husodo, dan Ngapon.

Demikianlah kata pengantar yang dapat kami sampaikan. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari kajian ini tentunya masih terdapat kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian. Selamat membaca!

Jakarta, 2012
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Cover	
Dewan Redaksi	ii
Kata Sambutan	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Kumpulan Abstraksi	ix

**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN : STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR
PERTAMBANGAN YANG TERCATAT DI BEI, 2005-2011**

Oleh: Ansoriyah Fadilah 1

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMASI PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS)**

Oleh: Herry Sumardjito, Arief Daryanto, Musa Hubeis, dan Eriyatno 17

**DETERMINAN INFLASI REGIONAL KOTA-KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2000-2009**

Oleh: Telisa Aulia Falianty dan Luthfi Hanifah 37

**DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN-KOREA FREE
TRADE AREA (AKFTA) TERHADAP INDONESIA DAN KOREA SELATAN**

Oleh: Sigit Setiawan 71

**PASAR MODAL DAN PEREKONOMIAN INDONESIA : BIAYA
KETERBUKAAN, PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM,
DAN PERAN PEMODAL ASING**

Oleh: Roy M. Manurung, Andriansyah, Bayu Husodo dan Ngapon 91

DAFTAR TABEL

PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN : STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERCATAT DI BEI, 2005-2011

Tabel 4.1.	Ringkasan Data Statistik Struktur Modal Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI Periode 2005-2011	7
Tabel 4.2.	Ringkasan Data Statistik Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI Periode 2005-2011	9
Tabel 4.3.	Hasil Estimasi Data Panel Model Persamaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI Periode 2005-2011	10

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMASI PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS)

Tabel 5.1.	Persentase Berdasarkan Indikator Kinerja	26
------------	--	----

DETERMINAN INFLASI REGIONAL KOTA-KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2000-2009

Tabel 2.1.	Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen	43
Tabel 3.1.	Jenis dan Sumber Data	46
Tabel 4.1.	Hasil Regresi dengan Efek Tetap	54
Tabel 4.2.	Hasil Regresi Variabel Penelitian dengan Efek Tetap	54
Tabel 4.3.	Hasil Uji Hipotesis Penelitian Dengan Efek Tetap	55

DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) TERHADAP INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Tabel 5.1.	Variabel Nilai Ekspor Dengan Skema AKFTA Dan Nilai Ekspor Tanpa Skema AKFTA Indonesia ke Korea Selatan	82
Tabel 5.2.	Peningkatan Nilai Ekspor Indonesia ke Korea Selatan Sebagai Dampak AKFTA	83
Tabel 5.3.	Variabel Nilai Ekspor Dengan Skema AKFTA Dan Nilai Ekspor Tanpa Skema AKFTA Korea Selatan ke Indonesia	85
Tabel 5.4.	Peningkatan Nilai Ekspor Korea Selatan ke Indonesia Sebagai Dampak AKFTA	86

DAFTAR GAMBAR

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMASI PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS)

Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian	21
Gambar 3.2. Alur Analisis Penelitian	21

DETERMINAN INFLASI REGIONAL KOTA-KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2000-2009

Grafik 1.1. Laju Inflasi 3 Kota di Jawa Barat dan Nasional Tahun 2001 – 2009	39
Gambar 3.1. Kerangka Pikir Konseptual Penelitian	45
Grafik 4.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009 (dalam ribuan rupiah)	47
Grafik 4.2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2009	48
Grafik 4.3. Perkembangan Belanja Daerah 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009 (dalam ribuan rupiah)	49
Grafik 4.4. Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009	49
Grafik 4.5. Perkembangan Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik 8 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2009	50
Grafik 4.6. Kondisi Infrastruktur Jalan 8 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009	51
Grafik 4.7. Perkembangan UMP di 8 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009 (dalam rupiah)	51
Grafik 4.8. Pertumbuhan UMP pada 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2009	52
Grafik 4.9. Perkembangan Suku Bunga Riil 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009	52
Grafik 4.10. Pertumbuhan Suku Bunga Riil 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2009	53

DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) TERHADAP INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	77
Gambar 4.1 Kontribusi Ekspor Nonmigas Indonesia ke Negara Mitra Utama Tahun 2010	81
Gambar 4.2 Kontribusi Impor Nonmigas Indonesia dari tiap Negara Mitra Utama Tahun 2010	81
Gambar 5.1 Hasil Ramalan Ekspor RI ke Korsel tanpa Skema Tarif AKFTA (Dalam US\$ 000)	82
Gambar 5.2 Hasil Ramalan Ekspor Korsel ke RI Tanpa Skema Tarif AKFTA (Dalam US\$ 000)	84

**PASAR MODAL DAN PEREKONOMIAN INDONESIA : BIAYA
KETERBUKAAN, PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM,
DAN PERAN PEMODAL ASING**

Grafik 3.1. Pendapat tentang Besarnya Biaya Keterbukaan yang Harus Dikeluarkan Terkait Pada Saat Penawaran Umum, Keterbukaan Berkala dan Keterbukaan Karena Peristiwa Penting .	97
Grafik 4.1. Hubungan IHSG dan Net Beli Asing	100
Grafik 4.2. Perkembangan Nilai Kepemilikan Saham oleh Pemodal Asing dan Lokal	103

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISSN 1410-3249 KEK Terakreditasi (No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012) Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012
<i>Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.</i>
ABSTRAKSI
Fadilah, Ansoriyah, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan) Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan : Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia, 2005-2011 Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012, halaman 1-16 <i>The purpose of this study was to analyze the impact of capital structure on financial performance of mining sector companies listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI). This study employed the descriptive analysis and a regression analysis of panel data. This study covered annual data of 30 mining sector companies listed in the BEI in a 7-year time horizon (2005-2011). The descriptive analysis showed that most of companies applied a low-leverage policy in their capital structure. In average, the companies generate a good financial performance, in terms of profitability ratios and market based ratios. The regression analysis of panel data showed that capital structure has a significant impact on the company's financial performance based on ROA, ROE, and PER, but have insignificant effect on the company's financial performance based on market-to-book value ratio.</i> <i>Keywords : Capital Structure, Financial Performance, Descriptive Analysis, Regression Analysis of Panel Data.</i>
Sumardjito, Herry, et. al. (Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan) Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Perpajakan (Studi Kasus pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus) Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012, halaman 17 - 36 <i>Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan terhadap kinerja pegawai pajak dan dampaknya terhadap penerimaan pajak, dengan mengambil kasus pada Kantor Wilayah</i>

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISSN 1410-3249 KEK Terakreditasi (No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012) Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012
<i>Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.</i>
ABSTRAKSI
<i>Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Reformasi perpajakan telah dilakukan sejak tahun 2002, sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2002. Kinerja DJP belum optimal, sehingga diperlukan upaya meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dan peningkatan tax ratio. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi dan mengkaji hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan reformasi perpajakan dan sejauhmana penerapannya, (2) mengkaji efektivitas penerapan reformasi perpajakan terhadap peningkatan kinerja pegawai dan dampaknya terhadap penerimaan pajak, dan (3) memberikan rekomendasi agar reformasi perpajakan dapat diterapkan secara optimal. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan korelasional, serta sebab akibat dengan menggunakan analisis deskriptif dan ekonometrika (model regresi logistik). Menggunakan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa faktor penting yang diprediksi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kinerja pegawai yang dicerminkan oleh peubah terikat Indikator Kinerja (IK) secara keseluruhan. Secara umum pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan belum meningkatkan kinerja pegawai DJP dan penerimaan pajak secara signifikan, sehingga pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan masih perlu ditingkatkan.</i> <i>Kata kunci: efektivitas reformasi perpajakan, kebijakan pajak, kinerja, reformasi administrasi pajak.</i>
Falianty, Telisa Aulia, dan Hanifah, Luthfi, et. al. (Universitas Indonesia) Determinan Inflasi Regional Kota-kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2009 Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012, halaman 37-70 <i>This research is intended to analyze determining variables of regional inflation at cities of West Java Province during 2000 – 2009. This study is motivated by the facts that inflation is known as an important indicator for economic development planning. Therefore, managing inflation rate become important for government to arrange their national development planning. Managing national inflation should follow whit managing regional inflation.</i>

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi****(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)****Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012***Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.***ABSTRAKSI**

Thus, identifying regional inflation determining variables become important process for managing phase of regional inflation. Approximation for regional inflation determining variable are monetary variables and non monetary variables. Monetary variables consist of real interest rate, while non monetary variables consist of regional indigenous income (PAD), regional expenditure, infrastructure condition, minimum wages rate, and inflation rate of DKI Jakarta. Method research for analysis is utilizes data panel regression Of G2SLS (Generalized two stage least square) with fixed effect method. The findings of this study point out that regional inflation at cities of West Java Province significantly affected by real interest rate, minimum wages rate, infrastructure condition, inflation rate of DKI Jakarta, regional indigenous income (PAD), and regional expenditure. Thus, shown that cost push effect system and demand pull effect system is work on to determine regional inflation at cities of West Java Province. This research also finding that regional that regional interaction is influencing regional inflation rate as shown on interaction between DKI Jakarta Province and cities in West Java Province which presumtive cause by distribution system of goods, commodity, and services from production area to consumption area.

Keywords : Inflasi, regional, PAD, upah minimum, infrastruktur

Setiawan, Sigit, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea FTA (AKFTA) terhadap Indonesia dan Korea Selatan

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012, halaman 71 – 90

Preferential tariff scheme on ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) Trade Agreement in Goods have been above four years after its entry into force on July 1, 2007, as stated in Minister of Finance Decree Number 131/PMK.011/2007. Its impact assessment should be conducted to review the expected gains for Indonesia and its country partner, South Korea from joining the agreement. This study employed a quantitative approach to measure and analyze the gains received by the two countries in AKFTA Trade Agreement in Goods from the increase of export growth and export contribution to national income. From the forecasting model employed, it

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISSN 1410-3249 KEK Terakreditasi (No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012) Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012
<i>Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.</i>
ABSTRAKSI
<i>showed that Indonesia gained more than Korea from AKFTA.</i> <i>Keywords : free trade area, preferential trade, export, impact assessment, AKFTA</i>
Roy M. Manurung, Andriansyah, Bayu Husodo, dan Ngapon, et. al. (Kementerian Keuangan) Pasar Modal dan Perekonomian Indonesia : Biaya Keterbukaan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan Peran Pemodal Asing Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 1 Tahun 2012, halaman 91 – 110 <i>This paper summarizes the results of the last three years of research conducted by the Economic Research Division of the Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK). The main topic of the research is related to the role of the capital market in the Indonesian economy, especially its role as the source of financing for business and as the alternative of investment for investors. The studies on the cost of disclosure, the use of IPO proceeds and the role of foreign investors will have special emphasizes.</i> <i>Keywords: Pasar Modal, Perekonomian, Biaya Keterbukaan, Penggunaan Dana Penawaran Umum, Pemodal Asing</i>

DETERMINAN INFLASI REGIONAL KOTA-KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2000 – 2009

Oleh :

Telisa Aulia Falianty¹

Luthfi Hanifah

Abstract

This research is intended to analyze determining variables of regional inflation at cities of West Java Province during 2000 – 2009. This study is motivated by the facts that inflation is known as an important indicator for economic development planning. Therefore, managing inflation rate become important for government to arrange their national development planning. Managing national inflation should follow whit managing regional inflation. Thus, identifying regional inflation determining variables become important process for managing phase of regional inflation. Approximation for regional inflation determining variable are monetary variables and non monetary variables. Monetary variables consist of real interest rate, while non monetary variables consist of regional indigenous income (PAD), regional expenditure, infrastructure condition, minimum wages rate, and inflation rate of DKI Jakarta. Method research for analysis is utilizes data panel regression Of G2SLS (Generalized two stage least square) with fixed effect method. The findings of this study point out that regional inflation at cities of West Java Province significantly affected by real interest rate, minimum wages rate, infrastructure condition, inflation rate of DKI Jakarta, regional indigenous income (PAD), and regional expenditure. Thus, shown that cost push effect system and demand pull effect system is work on to determine regional inflation at cities of West Java Province. This research also finding that regional that regional interaction is influencing regional inflation rate as shown on interaction between DKI Jakarta Province and cities in West Java Province which presumptive cause by distribution system of goods, commodity, and services from production area to consumption area.

Keywords : Inflasi, regional, PAD, upah minimum, infrastruktur

¹ Peneliti pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya pengendalian inflasi pada suatu negara di tingkat nasional harus diikuti dengan mencermati tingkat inflasi di tingkat regional pada wilayah-wilayah didalamnya. Hal ini karena tingkat inflasi nasional secara langsung dikontribusikan oleh tingkat inflasi yang terjadi di masing-masing daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Enrique Alberola & José Manuel Marqués (1999) mengungkapkan bahwa tingkat inflasi pada suatu negara berbeda-beda bergantung pada tingkat integrasi antar wilayahnya. Inflasi regional juga dipengaruhi oleh biaya upah minimum dan kebijakan makro ekonomi (Helena Marques, 2009).

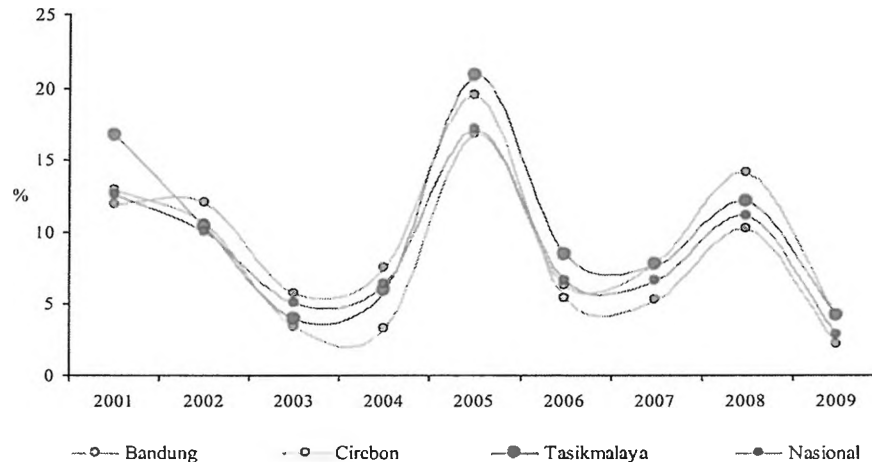
Di Indonesia, pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 dan UU no. 33 tahun 2004 membuat masing-masing daerah memiliki otoritas dalam menentukan tingkat perekonomian daerahnya. Perencanaan pembangunan secara keseluruhan diawali dari penetapan target inflasi yang ingin dicapai pada suatu periode waktu, dimana upaya untuk mengendalikan inflasi juga berhadapan dengan kondisi APBN di Indonesia yang masih sangat sensitif terhadap terjadinya perubahan tingkat inflasi. Di lain pihak, keberadaan *targeting inflation* semakin sulit untuk dikontrol pada era otonomi daerah, yang disebabkan oleh faktor dan kondisi yang berbeda pada tiap wilayah. Daerah memiliki kebebasan untuk menata aktivitas perekonomiannya, sehingga sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya inflasi pada suatu daerah semakin meluas dan sulit untuk dikontrol (Brodjonegoro, 2001). Tingginya pengaruh inflasi regional pada beberapa waktu terakhir mendorong pemerintah menggalakan pengendalian inflasi regional melalui pembentukan tim pengendalian inflasi daerah.

Salah satu daerah yang memiliki kontribusi cukup tinggi dalam tingkat inflasi nasional adalah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data BPS (2009) gabungan inflasi yang terjadi pada 3 kota di Provinsi Jawa Barat (Bandung, Cirebon, Tasikmalaya) menyumbang 8,33% dari inflasi nasional.

Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2011, terdapat tiga provinsi yang memiliki peran penting dalam laju inflasi nasional. Ketiga provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, dimana ketiga provinsi menyumbang hingga 47 % dari keseluruhan inflasi nasional². Keterkaitan lainnya, terlihat dari saling melengkapi peran ketiga daerah dalam pembentukan pasar dengan karakteristik masing-masing provinsi yang berbeda, dimana DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah konsumen yang tinggi, sementara Jawa Barat dan Banten sebagai pemasok barang.

² Hartadi Sarwono (2011) Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Jawa Barat – Banten – Jakarta.

Grafik 1.1. Laju Inflasi 3 Kota di Jawa Barat dan Nasional Tahun 2001 - 2009



Sumber: Indikator Ekonomi tahun 2000 - 2010, Badan Pusat Statistik

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi PDRB terbesar ketiga terhadap pembentukan PDB Nasional setelah DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Pada tahun 2009 Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi sebesar 14,4% terhadap PDB Nasional dan pada tahun 2010 kontribusi Provinsi Jawa Barat terhadap pembentukan PDB Nasional adalah sebesar 14,7%. Dilihat dari struktur pembentuknya, PDRB Provinsi Jawa Barat tidak mengalami perubahan selama 8 tahun terakhir (2002 - 2009) dimana sektor lapangan usaha industri pengolahan (manufaktur) masih merupakan sektor dengan kontribusi terbesar bagi PDRB Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 40%. Sektor lapangan usaha kedua yang memiliki kontribusi terbesar adalah perdagangan, hotel, dan restaurant dengan proporsi berkisar 18% - 22%. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa merupakan yang tertinggi setelah DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat dalam kurun waktu 2004-2008 dimana Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB tertinggi kedua di wilayah Pulau Jawa setelah DKI Jakarta yaitu sebesar 6%.

Kajian Bank Indonesia (KBI Cabang Bandung, 2007) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong tingginya inflasi di Provinsi Jawa Barat dapat diklasifikasikan ke dalam 3 faktor. Faktor pertama adalah faktor tren sektor usaha, dimana faktor ini sangat terkait dengan permintaan, penawaran, dan distribusi barang. Faktor kedua adalah faktor musiman, dimana di Provinsi Jawa Barat banyak sekali saat musiman yang menyebabkan permintaan akan suatu barang meningkat secara tajam dan berakibat pada meningkatnya inflasi. Faktor musiman, seperti masa panen raya, tahun ajaran baru, dan hari raya keagamaan sangat

berpengaruh terhadap pergerakan harga. Faktor ketiga adalah faktor ekspektasi, dimana isu/rumor yang berkembang di masyarakat cukup berpengaruh membentuk perilaku atau respon masyarakat terhadap harga. Pelaku ekonomi cenderung merespon terlalu awal terhadap adanya informasi yang justru menyebabkan kelangkaan pada barang dan meningkatnya permintaan. Kondisi ini pada akhirnya berakibat pada naiknya harga sehingga tingkat inflasi menjadi lebih tinggi hanya karena ekspektasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian mengenai determinan inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat menjadi sangat penting sebagai upaya pengendalian inflasi secara nasional yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi regional di Provinsi Jawa Barat, baik dari sektor moneter dan non moneter. Pendekatan yang digunakan adalah kelompok faktor non moneter menggunakan pendekatan variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah), belanja daerah, kondisi infrastruktur, biaya upah minimum, inflasi DKI dan faktor moneter melalui tingkat suku bunga riil.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian secara empiris determinan inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat dengan berdasarkan pada teori-teori inflasi dan studi-studi kajian empiris yang terkait oleh determinan inflasi regional yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk mengetahui kontribusi variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah), belanja daerah, kondisi infrastruktur, biaya upah minimum, tingkat suku bunga riil, dan inflasi DKI Jakarta terhadap inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat.

1.3. Metodologi Penelitian

Studi ini dilakukan dengan regresi panel data untuk menentukan variabel mana yang lebih dominan menentukan inflasi regional, apakah variabel yang berasal dari sektor moneter atau sektor non moneter. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dan diharapkan akan terlihat bagaimana kontribusi masing-masing variabel independen kepada variabel dependen. Selanjutnya secara mendalam model akan dibahas pada bagian Metodologi Penelitian. Studi ini menggunakan data sekunder yang bersumber antara lain dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

II. STUDI LITERATUR

Kestabilan inflasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor moneter maupun non moneter merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini membuat inflasi regional merupakan salah satu variabel yang akan selalu menarik untuk dikaji karena memberikan kontribusi besar dalam pembentukan inflasi nasional. Penelitian mengenai determinan inflasi regional telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti baik di tingkat internasional maupun tingkat nasional.

Penelitian Jun Nagayasu (2009), *Regional Inflation in China*, dengan sampel tingkat harga dan tingkat inflasi di China tahun 1991 – 2005 dan 27 provinsi, variabel yang digunakan *fundamental economics* dengan pendekatan pertumbuhan *money, credits, productivity, exchange rate*. Hasil yang diperoleh adalah bahwa inflasi regional di China dipengaruhi oleh perekonomian dalam negeri dan internasional, yang terangkum dalam fundamental perekonomian yaitu pertumbuhan uang beredar, kredit, produktivitas dan nilai tukar berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan inflasi regional.

Penelitian Helena Marques (2009), *Regional inflation dynamics using space-time models* yang menjelaskan bagaimana pengaruh faktor *spatial* dan *shock* pada kebijakan makro ekonomi dalam tingkat inflasi regional di Chile sehingga tingkat inflasi antar wilayah bersifat divergen. Variabel yang digunakan adalah tingkat inflasi regional untuk 98 barang *tradeable* dan biaya transportasi pada 23 kota di Chile, menghasilkan bahwa adanya perbedaan biaya transportasi pada distribusi barang akan mengakibatkan tingginya inflasi pada daerah tersebut. Sehingga biaya transportasi dan kebijakan makro ekonomi signifikan mempengaruhi inflasi pada suatu wilayah.

Penelitian Cesar Calderon and Klaus Schmidt (2009), *What drive inflation in the world*, menganalisis pengaruh sektor moneter dan non moneter terhadap inflasi dengan variabel Targeting inflation, sektor moneter (*peg exchange rate, flexible exchange rate*), sektor non moneter (*income percapita, private credit, democratic accountability, trade openness dan capital openness*). Metode yang digunakan adalah regresi *fixed effect* dan *random effect* data panel tahun 1975-2005, pada 97 negara di dunia. Hasil penelitian sektor moneter yaitu nilai tukar mata uang signifikan mempengaruhi *targeting* inflasi, dimana negara dengan kebijakan nilai tukar tetap mengalami inflasi lebih rendah 3% - 4% dibandingkan dengan negara yang menggunakan nilai tukar fleksibel. Sektor non moneter (*capital account dan financial openness*) signifikan mempengaruhi inflasi bahwa semakin tinggi variabel tersebut inflasi pada suatu negara akan semakin rendah pada negara *low income* dan *middle income* namun tidak berlaku untuk *high income*. Sektor non moneter yang lain yaitu *economic development* (pendekatan : *income percapita*) dan *domestic financial development* (pendekatan : *private credit*) akan mengurangi inflasi namun hanya pada kondisi tertentu seperti adanya *shock*.

Sedangkan *trade openness* dan *democratic accountability* tidak signifikan mempengaruhi inflasi

Penelitian Bambang P.S Brodjonegoro, Telisa A Falianty, dan Beta Y. Gitaharie (2005), *Determinant factors of regional inflation in decentralized Indonesia*, menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi regional di Indonesia menggunakan data primer dan sekunder. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa inflasi secara signifikan dipengaruhi oleh faktor-faktor non moneter dan moneter, yaitu Pertumbuhan PDRB, pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah), pertumbuhan belanja pemerintah daerah, pertumbuhan biaya transportasi lokal, kredit, dana pihak ketiga, infrastruktur dan tingkat suku bunga riil. Hasil yang diperoleh pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah), pertumbuhan belanja pemerintah daerah, pertumbuhan biaya transportasi lokal dan infrastruktur, signifikan mempengaruhi inflasi regional.

Penelitian Akinboade O.A. Niedermeier, E.W, & Siebrits, F.K. (2001), *South Africa's Inflation Dynamics: Implications for Policy*. Variabel yang digunakan *Gross Domestic Product (GDP)*, *Stock of money (M)*, *Nominal Interest Rate (i)*, *Consumer Price Indeks (CPI)*, *Labor Cost*, *Nominal effective exchange rate*, metode yang digunakan adalah *Structural Vector Autoregression (VAR)* dan *Cointegration test*. Periode data kuartalan 1970:01 sampai 2000:02. Variabel endogen pada persamaan *Purchasing Power Parity (PPP)*, *Money Demand (MD)*, dan *Labor Market relationship (LM)*. Dalam penelitian tersebut disimpulkan (1) adanya hubungan positif antara *labour cost* dengan inflasi domestik di Africa (2) Peningkatan nilai tukar (*nominal exchange rate*) akan menurunkan inflasi domestik di Africa (3) Peningkatan *money supply (MS)* yang tidak terkontrol akan mengancam inflasi Domestik. (4) *Purchasing Power Parity* akan menurun ketika inflasi domestik meningkat.

Penelitian Enrique Alberola & José Manuel Marqués (1999), *On the relevance and nature of regional inflation differentials : the case of Spain*. Variabel yang digunakan adalah pendapatan, produktivitas, shock pada permintaan dan penawaran, biaya transportasi, segmentasi pasar, dan barang yang *non tradable*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inflasi masing-masing wilayah pada suatu negara berbeda-beda bergantung pada tingkat integrasi antar wilayahnya. Tingkat integrasi yang tinggi akan mempengaruhi perubahan inflasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Variabel pendapatan, produktivitas, shock pada permintaan dan penawaran, biaya transportasi berpengaruh positif atas peningkatan inflasi di tingkat regional.

Berdasarkan uraian di atas tentang teori pengaruh determinan inflasi regional oleh faktor moneter dan non moneter, maka teori dan asumsi yang digunakan pada kerangka pembahasan penelitian tentang determinan inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Variablel	Teori/Kajian Empiris	Hubungan
GPAD	Negatif (-)	Bahwa inflasi berdampak pada sisi permintaan (<i>demand side</i>) ketika pajak meningkat maka akan menurunkan daya beli masyarakat (<i>purchasing power parity</i>) sehingga permintaan akan menurun sehingga harga menurun.
GLE	Positif (+)	Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatkan permintaan dan akan meningkatkan harga barang (<i>demand side</i>).
GUMP	Positif (+)	Biaya upah minimum rata-rata akan mempengaruhi biaya produksi sehingga meningkatkan tingkat inflasi pada suatu wilayah (<i>supply side</i>).
SINFRA	Negatif (-)	Pembangunan infrastruktur transportasi menghubungkan antara penyedia bahan baku dengan market. Kondisi infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya proses distribusi dan mengendalikan harga jual barang (<i>supply side</i>).
GKRIIL	Positif (+)	Meningkatnya suku bunga riil akan diikuti dengan penurunan tingkat investasi ataupun konsumsi sehingga jumlah output akan berkurang dan akan memacu inflasi (<i>supply side</i>).
INFDKI	Negatif (-)	Tingginya tingkat inflasi pada daerah konsumsi akan mengakibatkan penurunan jumlah permintaan pada daerah penyuplai barang dengan asumsi produksi tetap, dimana diasumsikan DKI Jakarta sebagai daerah konsumsi dan Provinsi Jawa Barat sebagai daerah penyuplai barang (<i>demand side</i>).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Pikir Teoritis dan Hipotesis Penelitian

3.1.1. Kerangka Pikir

Determinan dan dampak inflasi secara meluas dibicarakan dalam literatur ekonomi. Banyak model determinan inflasi yang digunakan dalam pengujian empiris terutama dari ketidaksempurnaan pasar dan adanya tekanan dari sektor

permintaan. Pendekatan determinan inflasi menurut (1) kaum moneteris (*monetarist approach to determinants of inflation*) dimana inflasi merupakan fenomena moneter domestik yang diakibatkan oleh keputusan bank sentral meningkatkan penawaran uang melebihi permintaan uang. Kenaikan penawaran uang dapat disebabkan oleh defisit fiskal sehingga pemerintah melakukan kebijakan *seigniorage*, atau ekstensi kredit yang terlalu besar kepada sektor swasta. Menurut Dornbusch dan Fisher (1998) pembiayaan defisit anggaran dan depresiasi nilai tukar akan mengakibatkan depresiasi inflasi, salah satunya dapat disebabkan oleh adanya penambahan jumlah uang yang beredar. (2) *Purchasing Power Parity Approach* menurut Boyd dan Smith (1999) bahwa PPP cocok digunakan negara-negara berkembang dengan tingkat inflasi yang tinggi dan ikatan perdagangan yang kuat dengan faktor luar negeri. (3) Strukturalist model, membedakan tekanan inflasi dasar atau disebut *structuralist model of determinants on inflation*. Penyebab inflasi dasar adalah kebijakan pemerintah yang bersifat distortif, konflik antara pemodal dan buruh yang terkait dengan distribusi laba dan upah, ketidakelastisan *supply* barang pangan dan keterbatasan anggaran pemerintah. Salah satu model inflasi yang terkenal diusulkan oleh Cardoso, 1981 (Akinboade, Niedermeire & Siebritis, 2001). (4) Penggabungan pendekatan strukturalis dan moneteris (*structuralist-moneterist model of the determinants of inflation*) yang menambahkan faktor-faktor dorongan harga (*cost up*) ke dalam pendekatan monetarist. Contohnya pada jurnal Akinboade, Niedermeire & Siebritis, 2001 adalah Jha (1994); Adam (1995); Durevall & Ndung'u (1999) dan Ndung'u dan Ngugi (1999) yang memasukkan faktor-faktor strukturalist ke dalam model moneteris.

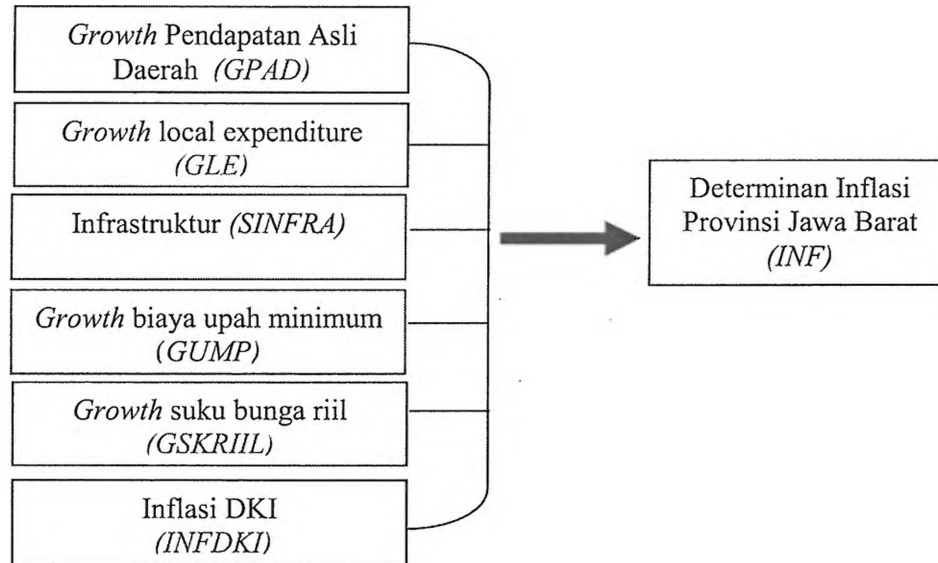
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya tentang determinan inflasi regional baik internasional maupun nasional, dengan menggunakan model determinan inflasi yaitu :

$$INF = F(GPAD, GLE, GKRED, SINFRA, GUMP, GSKRIIL, INFDKI)$$

- (1) *Growth* Pendapatan Asli Daerah (*PAD*);
- (2) *Growth* Local Expenditure (*LE*);
- (3) *Share* infrastruktur (*SINFRA*);
- (4) *Growth* biaya upah minimum (*UMP*);
- (5) *Growth* suku bunga riil (*SKRIIL*);
- (6) *Growth* tingkat inflasi DKI (*INFDKI*)

Menurut variabel-variabel determinan inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat baik eksogen dan endogen dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1.
Kerangka Pikir Konseptual Penelitian



3.1.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan maka diperoleh bentuk linear persamaan dengan menggunakan, sehingga diperoleh:

$$INF_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 GPAD_{it} + \beta_2 GLE_{it} + \beta_3 SINFRA_{it} + \beta_4 GUMP_{it} + \beta_5 GSKRIIL_{it} + \beta_6 INFDKI_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

INF = Inflasi regional

GPAD = Pertumbuhan Pendapatan asli daerah

GLE = Pertumbuhan belanja daerah (*local expenditure*)

SINFRA = Share kondisi infastruktur jalan terhadap total

GUMP = Pertumbuhan biaya upah minimum

GSKRIIL = Pertumbuhan Suku bunga riil

INFDKI = Inflasi DKI

e_{it} = *error term*

Berdasarkan pemahaman teoritis dan merujuk sejumlah temuan empiris sebelumnya, berikut adalah hipotesa yang digunakan pada penelitian determinan inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat :

- Pertumbuhan PAD signifikan mempengaruhi inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat, *ceteris paribus*.
- Pertumbuhan belanja daerah signifikan mempengaruhi inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat, *ceteris paribus*.
- Pertumbuhan biaya upah minimum signifikan mempengaruhi inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat, *ceteris paribus*.

- d. Kondisi infrastruktur signifikan mempengaruhi inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat, *ceteris paribus*.
- e. Perubahan suku bunga riil signifikan mempengaruhi inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat, *ceteris paribus*.
- f. Tingkat inflasi DKI signifikan mempengaruhi inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat, *ceteris paribus*.

3.2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari 8 kota di Provinsi Jawa Barat meliputi Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi. Variabel-variabel yang digunakan sebagai pendekatan adalah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (*PAD*) atas dasar harga konstan dan harga berlaku tahun 2000, data belanja daerah (*LE*), data kondisi infrastruktur (*INFRA*), data biaya upah minimum (*UMP*), data suku bunga riil (*SKRiil*) dan data inflasi DKI (*INFDKI*). Data – data tersebut diperoleh di Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia.

Tabel 3.1.
Jenis dan Sumber Data

No	Jenis Data	Pendekatan dan Sumber Data
1	Inflasi Regional	PDRB Deflator 8 Kota di Provinsi Jawa Barat, tahunan, Daerah Dalam Angka, BPS.
2	Pendapatan Asli Daerah (<i>PAD</i>)	Growth <i>PAD</i> harga konstan 8 Kota di Provinsi Jawa Barat, tahunan, Daerah Dalam Angka, BPS.
3	Pengeluaran pembangunan (<i>LE</i>)	Growth belanja daerah 8 Kota di Provinsi Jawa Barat, tahunan, Daerah Dalam Angka, BPS.
4	Kondisi infrastruktur (<i>INFRA</i>)	Growth belanja daerah 8 Kota di Provinsi Jawa Barat, tahunan, Daerah Dalam Angka, BPS.
5	Biaya <i>UMP</i> (<i>UMP</i>)	Growth upah minimum 8 Kota di Provinsi Jawa Barat, tahunan, Profil Jawa Barat, BPS.
6	Suku bunga riil (<i>SKRiil</i>)	Perubahan Suku bunga riil, SEKD Bank Indonesia, tahunan.
7	Inflasi DKI	PDRB Deflator Provinsi DKI Jakarta, tahunan, Daerah Dalam Angka, BPS.

3.3. Metode Analisis

3.3.1. Model Estimasi Data Panel

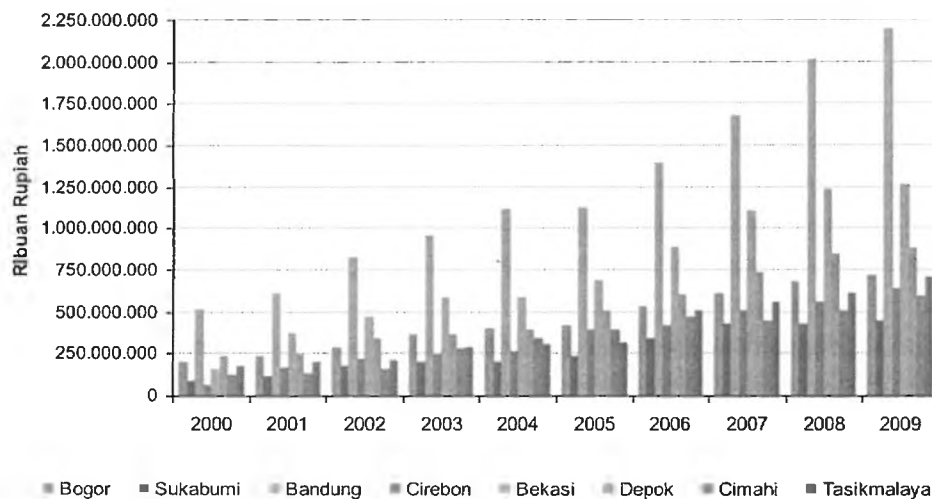
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang menggabungkan observasi lintas sektoral dan data runtun waktu (*time series*) sehingga jumlah observasi meningkat, meningkatkan derajat kebebasan dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas sehingga akan memperbaiki efisiensi estimasi ekonometri.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

4.1.1. Pendapatan Daerah (*Growth* PAD)

Grafik 4.1.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2009 (dalam ribuan rupiah)



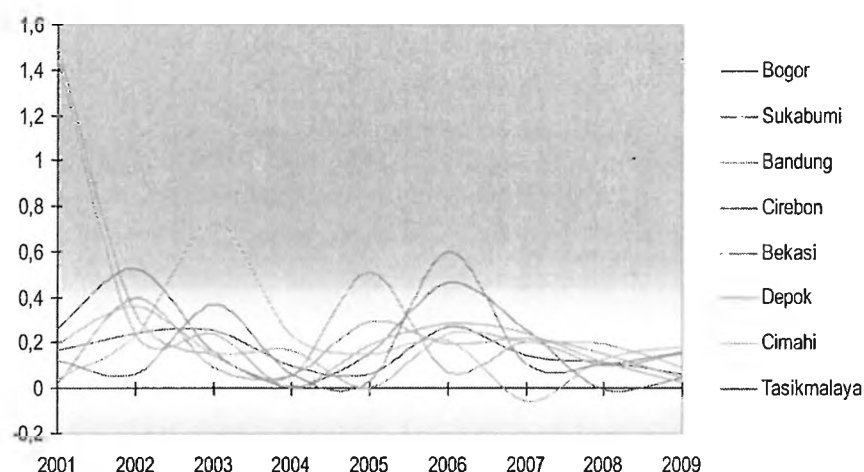
Sumber : BPS 2010, telah diolah kembali.

Data Jawa Barat dalam angka tahun 2000 - 2009, menunjukkan bahwa Kota yang memiliki PAD paling tinggi adalah Kota Bandung. PAD Kota Bandung tumbuh dari Rp 510 Milyar di tahun 2000 menjadi Rp 2,2 Triliun di tahun 2009. Potensi dan keunggulan sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dengan semua infrastrukturnya turut mendukung perkembangan PAD Kota Bandung. Kota kedua yang memiliki PAD tertinggi di Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bekasi, dimana pada tahun 2000 PAD Kota Bekasi yang hanya sebesar Rp 154 Milyar meningkat menjadi Rp 1,2 Triliun di tahun 2009. Adapun kota yang memiliki PAD terkecil

adalah Kota Sukabumi, yaitu sebesar Rp 90 Milyar di tahun 2000 dan di tahun 2009 sebesar Rp 440 Milyar.

Berdasarkan pertumbuhannya, pendapatan asli daerah di 8 kota Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, dan penurunan pertumbuhan terjadi pada tahun 2004-2005 disebabkan karena tingginya tingkat inflasi yang dipacu kenaikan harga BBM yang kemudian meningkat lagi pada tahun 2006. Berikut adalah pertumbuhan pendapatan asli daerah pada 8 kota di Provinsi Jawa Barat :

Grafik 4.2.
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2009



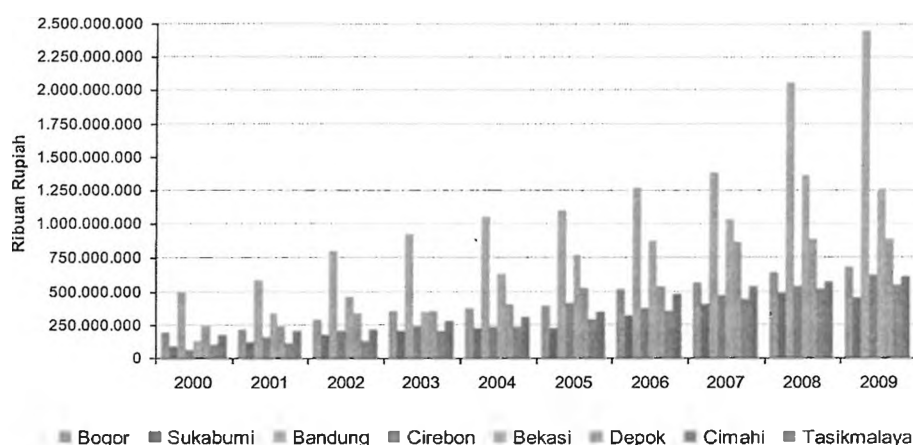
Sumber : BPS 2010, telah diolah kembali.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi selama periode 2000 - 2009 dimiliki oleh Kota Cirebon dengan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 33,93%/tahun, kemudian Kota Bekasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,92% per tahun.

4.1.2. Belanja Daerah (*Growth LE*)

Belanja daerah sangat erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah. Oleh karenanya sebagai kota yang memiliki PDRB tertinggi, Kota Bandung juga merupakan kota dengan belanja daerah tertinggi di antara 8 kota di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2000, belanja daerah Kota Bandung adalah sebesar Rp 498 miliar dan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 2,4 triliun. Kota Bekasi menempati urutan tertinggi kedua dalam belanja daerah, yaitu sebesar Rp 1,25 Triliun di tahun 2009.

Grafik 4.3.
Perkembangan Belanja Daerah 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009 (dalam ribuan rupiah)



Sumber: BPS 2010, telah diolah kembali.

Data belanja daerah menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan belanja daerah mengalami penurunan pada tahun 2004 dan meningkat pada tahun 2006 yang kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2009.

Grafik 4.4.
Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009



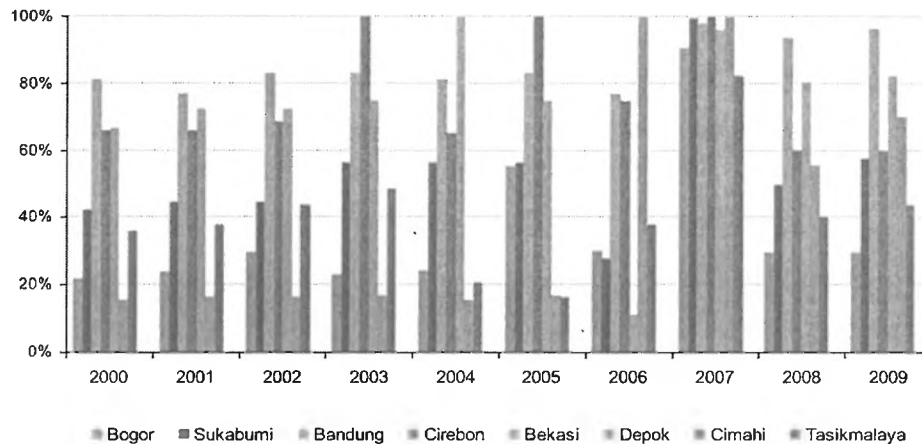
Sumber : BPS 2010, telah diolah kembali.

Pertumbuhan belanja daerah terbesar terjadi di Kota Bekasi dan Kota Cirebon pada tahun 2000, dimana besaran pertumbuhan belanja daerah di 8 Kota di Jawa Barat cenderung berada pada trend yang sama.

4.1.3. Infrastruktur (SINFRA)

Kondisi infrastruktur pada delapan kota di Propinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat persentase kondisi jalan yang baik dengan total panjang jalan yang tersedia. Berdasarkan data perkembangan kondisi jalan terlihat bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan kondisi jalan di kota-kota di Provinsi Jawa Barat.

Grafik 4.5.
Perkembangan Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik 8 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2009

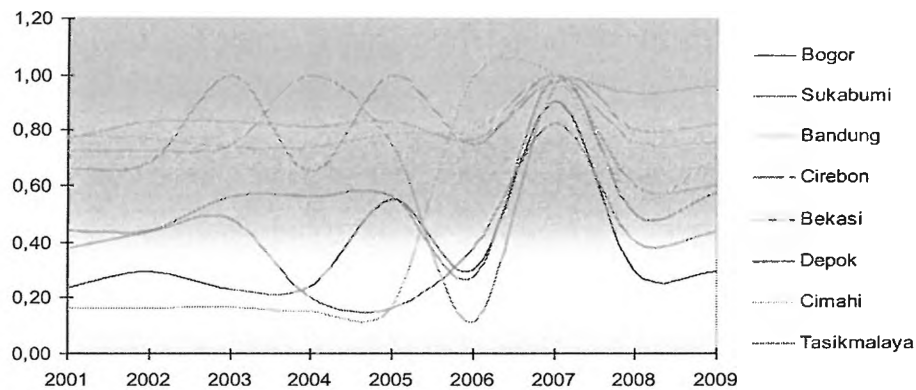


Sumber: BPS 2010, telah diolah kembali.

Pada tahun 2000, hanya 3 dari 8 kota yang memiliki kondisi jalan baik dengan proporsi 50% dari total panjang jalan di masing-masing kota tersebut. Ketiga kota tersebut adalah Kota Bandung, Cirebon, dan Bogor. Dalam perkembangannya kondisi jalan masing-masing kota mulai mengalami perbaikan dan peningkatan. Hal ini terlihat berdasarkan data di tahun 2009, dimana terdapat 6 kota yang telah memiliki kondisi jalan baik dengan proporsi 50% ke atas dari keseluruhan jalan yang ada di masing-masing kota.

Berdasarkan perkembangan proporsinya, kota-kota yang memiliki kondisi jalan baik dengan persentase yang rendah pada tahun 2000 hingga tahun 2005 adalah Kota Cimahi, Kota Bogor dan Kota Tasikmalaya.

Grafik 4.6.
Kondisi infrastruktur jalan 8 kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2000 – 2009



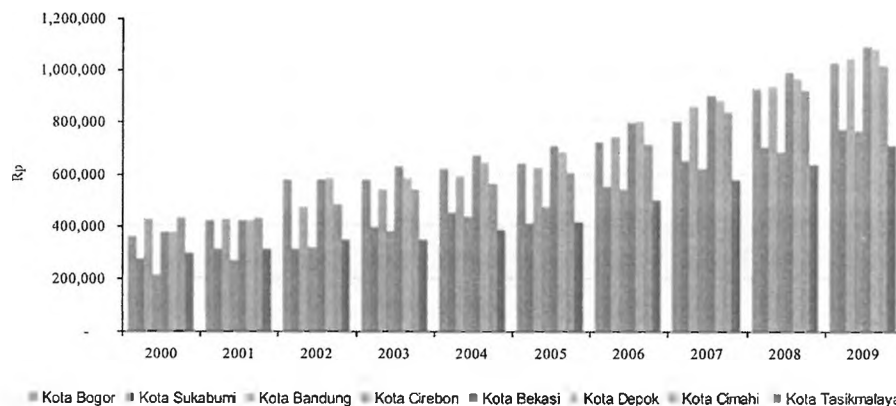
Sumber : BPS 2010, telah diolah kembali.

Sedangkan kota yang memiliki kualitas jalan yang baik dengan proporsi yang tinggi adalah Kota Cirebon dan Bandung. Selama periode tahun 2000 – 2009, kondisi jalan yang baik di Kota Cirebon adalah rata-rata sebesar 85% dari total panjang jalan di Kota tersebut. Adapun Kota Bandung berada posisi kedua kota dengan rata-rata kualitas kondisi infrastruktur tertinggi, yaitu sebesar 79,3%.

4.1.4. Upah Minimum (*Growth UMP*)

Perkembangan upah minimum regional pada 8 kota di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan selama periode tahun 2000 – 2009 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2009, tingkat UMP tertinggi dimiliki oleh Kota Bekasi yaitu sebesar Rp 1.089.000 per bulan, disusul oleh Kota Depok sebesar Rp 1.078.000 per bulan.

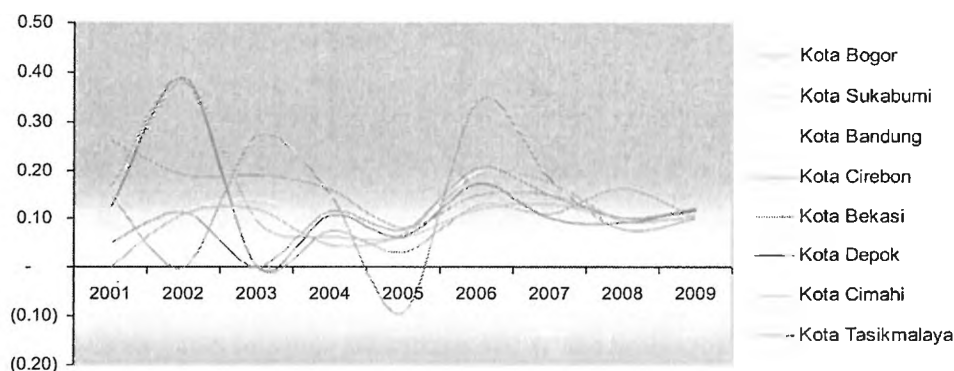
Grafik 4.7.
Perkembangan UMP di 8 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009
(dalam rupiah)



Sumber: BPS 2010, telah diolah kembali.

Berdasarkan pertumbuhannya, rata-rata kenaikan UMP pada 8 kota di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2000 – 2009 berada pada kisaran 10% - 15% per tahunnya. Rata-rata kenaikan UMP tertinggi selama periode tahun 2000 – 2009 terjadi di Kota Cirebon, yaitu sebesar 15,56% per tahun, disusul oleh Kota Bekasi sebesar 13,04% per tahun dan Kota Depok dengan rata-rata kenaikan 13,01% per tahun.

Grafik 4.8.
Pertumbuhan UMP pada 8 kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2000 - 2009

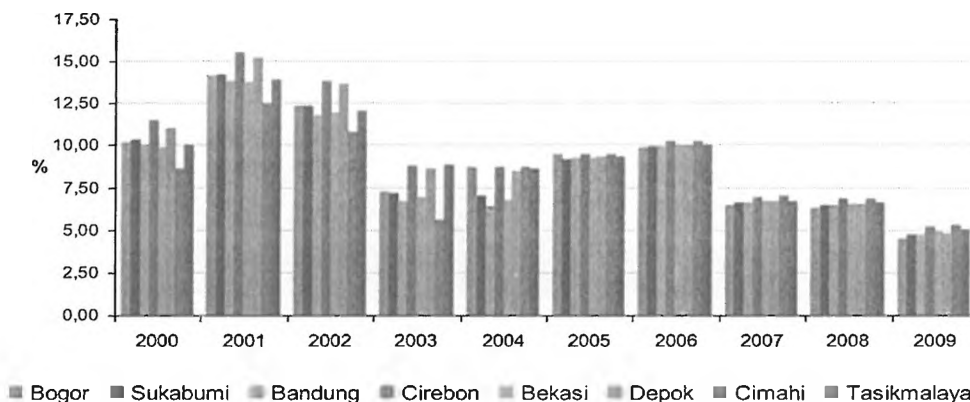


Sumber : BPS 2010, telah diolah kembali.

4.1.5. Suku Bunga Riil (*Growth TRANS*)

Suku bunga riil menunjukkan margin antara SBI dengan inflasi yang terjadi di masing-masing kota. Secara keseluruhan perkembangan suku bunga riil di 8 kota di provinsi Jawa Barat berada pada kisaran yang sama.

Grafik 4.9.
Perkembangan Suku Bunga Riil 8 kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2009

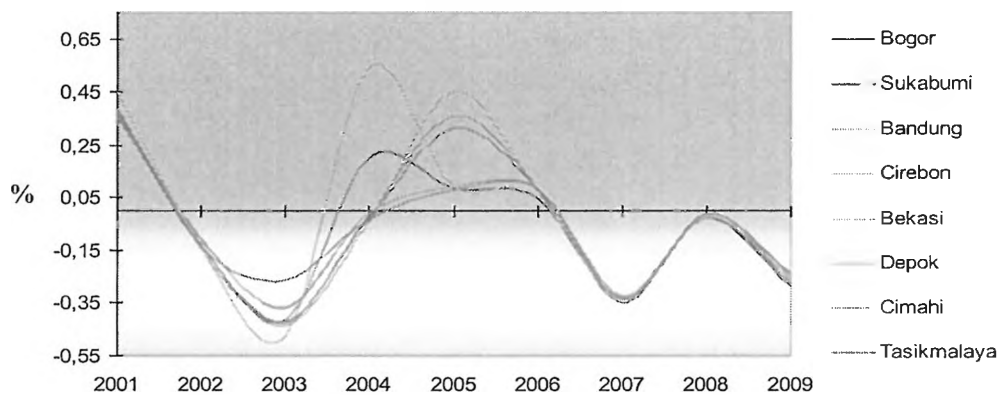


Sumber : BPS 2010, telah diolah kembali.

Pada tahun 2000 suku bunga riil 8 kota di Provinsi Jawa Barat berada pada kisaran 9% - 11% dan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2009 suku bunga riil berada pada kisaran 5%. Bila dilihat dari trend tingkat suku bunga riil pada masing – masing kota di Provinsi Jawa Barat memiliki kecenderungan yang relatif sama.

Pola fluktuasi pertumbuhan suku bunga riil pada 8 kota di Provinsi Jawa Barat cenderung sama, dimana kenaikan pertumbuhan terjadi mulai periode 2003 -2005 dan kembali menurun di tahun 2006 – 2007 sebelum kemudian kembali mengalami trend kenaikan.

Grafik 4.10.
Pertumbuhan Suku Bunga Riil 8 kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2000-2009



Sumber : BPS 2010, telah diolah kembali.

4.2. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil koefisien determinasi R^2 yang digunakan untuk melihat *goodness off fit* model setelah menggunakan *metode generalized two stage least square (G2SLS) fixed effect* menunjukkan sebesar 0.532 (53.2%), maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki hubungan linier dengan variabel dependen, dimana variabel independen pada model dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 53.2% dan sisanya sebesar 46,8% dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel dengan jumlah *crossection* sebesar 8 kota dan time series sebanyak 10 tahun sehingga total observasi adalah sebesar 72. Berikut hasil regresi dengan menggunakan *fixed effect* :

Tabel 4.1.
Hasil Regresi dengan Efek Tetap

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.688515	0.348238	10.59195	0.00000
GPAD?	-0.53243	0.299074	-1.780262	0.08030
GLE?	0.519526	0.228891	2.269756	0.02700
SINFRA?	-0.842147	0.210543	-3.999884	0.00020
GUMR?	0.896962	0.526697	-1.702994	0.09390
GSKRIIL?	-1.152179	0.196937	-5.850488	0.00000
INFDKI?	-0.660616	0.174274	-3.790675	0.00040
Fixed Effects (Cross)				
_BGR--C	-0.180044			
_SKM--C	0.171813			
_BDG--C	0.560558			
_CRB--C	-0.466898			
_BKS--C	0.401646			
_DPK--C	-0.346277			
_CMH--C	0.223688			
_TSK--C	-0.364487			

Sumber : olahan data, 2011

Tabel 4.2.
Hasil Regresi Variabel Penelitian dengan Efek Tetap

Weighted Statistics			
		Mean dependent	
R-squared	0.539220	var	2.620002
Adjusted R-squared	0.435942	S.D. dependent var	1.357414
S.E. of regression	0.597443	Sum squared resid	20.7024
F-statistic	5.221036	Durbin-Watson stat	1.042306
Prob(F-statistic)	0.000005	Second-Stage SSR	20.7024
Instrument rank	14		
Unweighted Statistics			
		Mean dependent	
R-squared	0.449387	var	2.116952
Sum squared resid	21.18018	Durbin-Watson stat	0.939578

Sumber : olahan data, 2011

Pada tabel terlihat bahwa sebelum menggunakan *fixed effect* sebelum di *weighted* koefisien determinasi R^2 adalah 0.4476 dimana setelah menggunakan *2SLS fixed effect weighted* koefisien determinasi R^2 menjadi 0.5325 dimana asumsi model telah BLUE yang telah terbebas dari autokolineritas dan heteroskedastik.

Berdasarkan hipotesis masing-masing variabel yang berpengaruh terhadap determinan inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat adalah :

Tabel 4.3.
Hasil Uji Hipotesis Penelitian Dengan Efek Tetap

Variable	Probabilitas	Signifikansi (α)	Keputusan
GPAD	0.0803*	10%	Signifikan mempengaruhi inflasi regional
GLE	0.0270**	10%	Signifikan mempengaruhi inflasi regional
SINFRA	0.0002***	10%	Signifikan mempengaruhi inflasi regional
GUMP	0.0939*	10%	Signifikan mempengaruhi inflasi regional
GSKRIIL	0.0000***	10%	Signifikan mempengaruhi inflasi regional
INFDKI	0.0004***	10%	Signifikan mempengaruhi inflasi regional

Sumber : olahan data, 2011

* Signifikan dalam 10 %

** Signifikan dalam 5 %

*** Signifikan dalam 1 %

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (GPAD)

H_0 : Pertumbuhan PAD tidak signifikan mempengaruhi inflasi regional di Provinsi Jawa Barat, ceteris paribus.

Uji signifikansi dilakukan pada variabel bebas pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (GPAD) dapat dilihat dari nilai *p-value t-stat* dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 90 % ($\alpha = 10$ %). Variabel pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (GPDRB) memiliki nilai *p-value t-stat* sebesar 0.0803, dimana berada pada batas dari 0.10 sehingga dapat diartikan (GPAD) berada pada daerah tolak H_0 . Hal ini berarti variabel pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (GPAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi regional di Propinsi Jawa Barat. Sedangkan hasil pengujian arah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (GPAD) adalah (-0.5324) yang menandakan adanya arah hubungan negatif antara variabel pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (GPAD) dengan tingkat inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat. Ini berarti jika pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (GPAD) naik sebesar 1% maka inflasi Jawa Barat akan menurun sebesar 0.53%

b. Pertumbuhan belanja daerah (GLE)

H_0 : Pertumbuhan belanja daerah (GLE) tidak signifikan mempengaruhi inflasi regional di Provinsi Jawa Barat, ceteris paribus.

Uji signifikansi dilakukan pada variabel bebas pertumbuhan belanja daerah (GLE) dapat dilihat dari nilai *p-value t-stat* dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 90 % ($\alpha = 10$ %). Variabel pertumbuhan belanja daerah (GLE) memiliki nilai *p-value t-stat* sebesar 0.0270, dimana lebih kecil dari 0.10 sehingga dapat diartikan (GLE) berada pada daerah tolak H_0 . Hal ini berarti variabel pertumbuhan belanja daerah (GLE) memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi regional di Propinsi Jawa Barat. Sedangkan hasil pengujian arah pertumbuhan belanja daerah (GLE) adalah (0.5195) yang menandakan adanya arah hubungan positif antara variabel pertumbuhan belanja daerah (GLE) dengan tingkat inflasi di Provinsi Jawa Barat. Ini berarti jika pertumbuhan belanja daerah (GLE) naik sebesar 1% maka inflasi Jawa Barat akan meningkat sebesar 0.51%.

c. Kondisi infrastruktur (SINFRA)

H_0 : Kondisi infrastruktur (SINFRA) tidak signifikan mempengaruhi inflasi regional di Provinsi Jawa Barat, ceteris paribus.

Uji signifikansi dilakukan pada variabel bebas infrastruktur (SINFRA) dapat dilihat dari nilai *p-value t-stat* dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 90% ($\alpha = 10$ %). Variabel infrastruktur (SINFRA) memiliki nilai *p-value t-stat* sebesar 0.0002, dimana lebih kecil dari 0.10 sehingga dapat diartikan infrastruktur (SINFRA) berada pada daerah tolak H_0 . Hal ini berarti variabel infrastruktur (SINFRA) memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi regional di Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya adalah perlakuan antara hubungan variabel independen dan dependennya, dimana output regresi menunjukkan nilai koefisien (-0.8421). Angka ini menginterpretasikan bahwa terdapat hubungan negatif antara inflasi regional dengan infrastruktur (SINFRA). Sehingga bila infrastruktur (SINFRA) meningkat sebesar 1% maka inflasi regional di Propinsi Jawa Barat akan menurun sebesar 0.84 %.

d. Pertumbuhan biaya upah minimum (GUMP)

H_0 : Pertumbuhan biaya upah minimum (GUMP) tidak signifikan mempengaruhi inflasi regional di Provinsi Jawa Barat, ceteris paribus.

Uji signifikansi dilakukan pada variabel bebas pertumbuhan biaya upah minimum (GUMP) dapat dilihat dari nilai *p-value t-stat* dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 90% ($\alpha = 10$ %). Variabel pertumbuhan biaya upah minimum (GUMP) memiliki nilai *p-value t-stat* sebesar 0.0939, dimana lebih kecil dari 0.10 sehingga dapat diartikan pertumbuhan biaya upah minimum (GUMP) berada pada daerah tolak H_0 . Hal ini berarti

variabel pertumbuhan biaya upah minimum (GUMP) memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi regional di Propinsi Jawa Barat. Sedangkan hasil pengujian arah pertumbuhan biaya upah minimum (GUMP) adalah (0.8969) yang menandakan adanya arah hubungan positif antara variabel pertumbuhan biaya upah minimum (GUMP) dengan tingkat inflasi di Provinsi Jawa Barat. Ini berarti jika pertumbuhan biaya upah minimum (GUMP) naik sebesar 1% maka inflasi Jawa Barat akan meningkat sebesar 0.89%.

e. Pertumbuhan suku bunga riil (GSKRiil)

Ho : Pertumbuhan suku bunga riil (GSKRiil) tidak signifikan

mempengaruhi inflasi regional di Provinsi Jawa Barat, ceteris paribus.

Uji signifikansi dilakukan pada variabel bebas pertumbuhan biaya suku bunga riil (GSKRiil) dapat dilihat dari nilai *p-value t-stat* dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 90% ($\alpha = 10\%$). Variabel pertumbuhan suku bunga riil (GSKRiil) memiliki nilai *p-value t-stat* sebesar 0.0000, dimana lebih kecil dari 0.10 sehingga dapat diartikan pertumbuhan suku bunga riil (GSKRiil) berada pada daerah tolak H_0 . Hal ini berarti variabel pertumbuhan suku bunga riil (GSKRiil) memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi regional di Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya adalah perlakuan antara hubungan variabel independen dan dependen nya, dimana output regresi menunjukkan nilai koefisien (-1.1521). Angka ini menginterpretasikan bahwa terdapat hubungan negatif antara inflasi regional dengan pertumbuhan suku bunga riil (GSKRiil). Sehingga bila pertumbuhan suku bunga riil (GSKRiil) meningkat sebesar 1% maka inflasi regional di Propinsi Jawa Barat akan menurun sebesar 1,15%.

f. Tingkat inflasi DKI (INFDKI)

Ho : Tingkat inflasi DKI (INFDKI) tidak signifikan mempengaruhi inflasi regional di Provinsi Jawa Barat, ceteris paribus.

Uji signifikansi dilakukan pada variabel bebas tingkat inflasi DKI (INFDKI) dapat dilihat dari nilai *p-value t-stat* dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 90% ($\alpha = 10\%$). Variabel tingkat inflasi DKI (INFDKI) memiliki nilai *p-value t-stat* sebesar 0.0017, dimana lebih kecil dari 0.1 sehingga dapat diartikan tingkat inflasi DKI (INFDKI) berada pada daerah tolak H_0 . Hal ini berarti variabel tingkat inflasi DKI (INFDKI) memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi regional di Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya adalah perlakuan antara hubungan variabel independen dan dependennya, dimana output regresi menunjukkan nilai koefisien (-0.6320). Angka ini menginterpretasikan bahwa terdapat hubungan negatif antara inflasi regional dengan tingkat inflasi DKI (INFDKI). Sehingga bila tingkat inflasi DKI (INFDKI) meningkat sebesar 1% maka inflasi regional di Propinsi Jawa Barat akan menurun sebesar 0.63%.

Hasil di atas menunjukkan model penelitian sebagai berikut :

$$INF_{it} = \alpha_{it} - \beta_1 GPAD_{it} + \beta_2 GLE_{it} - \beta_3 SINFRA_{it} + \beta_4 GUMP_{it} - \beta_5 GSKRIIL_{it} - \beta_6 INFDKI_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan data panel yang meliputi 8 kota dan 10 tahun periode diperoleh persamaan :

$$INF_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \alpha_5 D_{5i} + \alpha_6 D_{6i} + \alpha_7 D_{7i} + \alpha_8 D_{8i} + \alpha_9 D_{9i} + \alpha_{10} D_{10i} - 0.532 GPAD_{it} + 0.519 GLE_{it} - 0.842 SINFRA_{it} + 0.896 GUMP_{it}$$

<i>Prob.</i>	0.0803	0.0270	0.0002	0.0939
<i>Standart Error</i>	0.2990	0.2288	0.2105	0.5266

$$- 1.152 GSKRIIL_{it} - 0.660 INFDKI_{it}$$

<i>Prob.</i>	0.0000	0.0004
<i>Standart Error</i>	0.1969	0.1742

Tingkat koefisien terbesar yang mempengaruhi inflasi regional adalah suku bunga riil, biaya upah minimum, kondisi infrastruktur, inflasi DKI Jakarta, belanja daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang mempengaruhi inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat. Nilai koefisien untuk masing-masing kota berbeda-beda berdasarkan karakteristik daerahnya. Persamaan masing-masing kota terobservasi adalah :

$$\begin{aligned} INF_{Bandung} &= 4.24 - 0.532 GPAD + 0.519 GLE - 0.842 SINFRA + 0.896 GUMP - 1.152 GSKRIIL - 0.660 INFDKI \\ INF_{Bekasi} &= 4.09 - 0.532 GPAD + 0.519 GLE - 0.842 SINFRA + 0.896 GUMP - 1.152 GSKRIIL - 0.660 INFDKI \\ INF_{Cimahi} &= 3.91 - 0.532 GPAD + 0.519 GLE - 0.842 SINFRA + 0.896 GUMP - 1.152 GSKRIIL - 0.660 INFDKI \\ INF_{Sukabumi} &= 3.86 - 0.532 GPAD + 0.519 GLE - 0.842 SINFRA + 0.896 GUMP - 1.152 GSKRIIL - 0.660 INFDKI \\ INF_{Bogor} &= 3.50 - 0.532 GPAD + 0.519 GLE - 0.842 SINFRA + 0.896 GUMP - 1.152 GSKRIIL - 0.660 INFDKI \\ INF_{Depok} &= 3.34 - 0.532 GPAD + 0.519 GLE - 0.842 SINFRA + 0.896 GUMP - 1.152 GSKRIIL - 0.660 INFDKI \\ INF_{Tasimalaya} &= 3.324 - 0.532 GPAD + 0.519 GLE - 0.842 SINFRA + 0.896 GUMP - 1.152 GSKRIIL - 0.660 INFDKI \\ INF_{Cirebon} &= 3.221 - 0.532 GPAD + 0.519 GLE - 0.842 SINFRA + 0.986 GUMP - 1.132 GSKRIIL - 0.632 INFDKI \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil regresi, intersep kota-kota di Provinsi Jawa Barat yang terobservasi maka diketahui bahwa tingkat inflasi yang dipengaruhi independen variabel selain yang telah dimasukkan ke dalam model tertinggi terjadi di Kota Bandung. Hal ini diduga disebabkan beberapa faktor di antaranya adalah permintaan yang cukup besar pada Kota Bandung terutama untuk kelompok bahan makanan, kesehatan, pendidikan dan makanan jadi. Salah satu hal yang menarik di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung adalah dalam *event* tertentu seperti libur panjang, hari raya keagamaan terjadi peningkatan demand yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2007), peningkatan *demand* bukan dari masyarakat Bandung sendiri namun karena sebagai kota wisata belanja, selama musim liburan atau masa pendapatan anak sekolah Kota Bandung menarik banyak wisatawan atau masyarakat dari wilayah lain seperti Jakarta. Sebagai ilustrasi, pada akhir pekan yang panjang (*long-weekend*) tiga hari, jumlah pendatang yang berlibur di Kota Bandung diperkirakan berjumlah 200 ribu-300 ribu orang. Dengan asumsi setiap orang selama di Bandung melakukan konsumsi sebesar Rp 100.000,00 per hari, maka selama akhir pekan tersebut terjadi penambahan permintaan sebesar Rp 20-30 miliar per hari. Pendatang tersebut menciptakan *pseudo demand* (dalam arti bukan oleh penduduk Bandung) yang cukup tinggi. Terlebih lagi mengingat perbedaan harga di Jakarta dan Bandung khususnya untuk tarif hotel, harga makanan jadi seperti kue dan makanan di restoran dan produk pakaian bermerk (*branded*), sehingga hal tersebut membuat penduduk Jakarta merasakan kemampuan membeli yang sangat tinggi. Namun, dampaknya, produsen menjadi relatif leluasa menaikkan harga.

Sedangkan pada Kota Bekasi dan Kota Cimahi, tingginya inflasi diduga disebabkan karena *spill over*³. Tingginya inflasi pada Kota Bekasi merupakan dampak dari Kota DKI Jakarta sebagai wilayah perbatasan sedangkan tingginya inflasi pada Kota Cimahi merupakan dampak dari Kota Bandung sebagai wilayah perbatasan. Tingkat harga barang di Kota Bandung dan Provinsi DKI Jakarta yang tinggi turut berpengaruh terhadap tingkat harga barang di Kota Bekasi dan Kota Cimahi yang secara geografis berbatasan langsung

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi daerahnya. Di Indonesia, pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah no. 32/2004 dan UU no. 33/2004 telah membuat daerah

³ Margarida Duarte, Alexdander L. Wolman, 2003, *Fiscal policy and regional inflation in a currency union*.

memiliki otoritas dalam merencanakan pembangunan perekonomian daerahnya. Oleh karenanya sebagai salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan perekonomian daerah, pengendalian inflasi harus dilakukan mulai dari tingkat regional. Hal ini merupakan alasan penting dilakukannya penelitian determinan inflasi regional kota-kota di Propinsi Jawa Barat. Bank Indonesia melalui otoritas moneternya harus mampu merumuskan strategi moneter dalam suatu kebijakan yang berlandaskan kerangka kerja ekonomi daerah menurut Undang-Undang Otonomi Daerah. Tingkat inflasi daerah yang tinggi menjadi salah satu dampak atas berlakunya undang-undang otonomi daerah, karena tingkat inflasi dipengaruhi oleh variabel-variabel baik moneter dan non moneter.

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa identifikasi variabel yang berpengaruh dalam inflasi daerah dan kajian bagaimana hubungan variabel tersebut terhadap inflasi regional sehingga selanjutnya otoritas moneter melalui Bank Indonesia dan otoritas non moneter melalui pemerintah daerah dapat melakukan kontrol terhadap inflasi yang disebabkan oleh variabel moneter dan non moneter. Selanjutnya, tujuan akhir yang diharapkan adalah bagaimana tingkat inflasi yang terjadi di daerah dapat terkendali dan menjadi stimulan dalam pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menghasilkan temuan bagaimana variabel moneter dan non moneter mempengaruhi inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat meliputi Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya. Temuan yang diperoleh adalah :

1. Kontribusi determinan inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat terbesar adalah suku bunga riil (*cost push inflation*), biaya upah minimum (*cost push inflation*), kondisi infrastruktur (*cost push inflation*), inflasi DKI Jakarta (*demand pull inflation*), pendapatan asli daerah (*demand pull inflation*) dan belanja daerah (*demand pull inflation*). Hal ini menjelaskan bahwa tingginya inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh gabungan variabel *cost push* dan *demand pull*.
2. Pengaruh masing-masing variabel dalam penelitian ditunjukkan pada arah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen yaitu (1) suku bunga riil berpengaruh negatif terhadap inflasi di Provinsi Jawa Barat (2) biaya upah minimum berpengaruh positif terhadap inflasi di Provinsi Jawa Barat (3) kondisi infrastruktur berpengaruh negatif terhadap inflasi di Provinsi Jawa Barat (4) inflasi DKI Jakarta berpengaruh negatif terhadap inflasi di Provinsi Jawa Barat (5) pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap inflasi di Provinsi Jawa Barat dan (6) belanja daerah berpengaruh positif terhadap inflasi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa tingkat inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh adanya pengaruh kombinasi antara variabel moneter dan non moneter.

3. Variabel determinan inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki arah hubungan tidak sejalan dengan teori yang dibahas sebelumnya adalah pertumbuhan suku bunga riil. Tingkat suku bunga riil mempengaruhi sektor kredit baik investasi maupun konsumsi. Hal ini diduga karena besarnya kredit pada kota-kota di Provinsi Jawa Barat didominasi penggunaannya oleh kredit konsumsi. Penggunaan kredit untuk tujuan konsumtif akan tertekan apabila terjadi kenaikan suku bunga sehingga mengurangi tingkat permintaan konsumsi dan tingkat harga akan lebih terkendali. Besaran kredit yang tersalurkan pada kota-kota di Provinsi Jawa Barat belum dapat mendukung sektor produksi melalui investasi.
4. Adanya pengaruh interaksi regional yang memengaruhi tingkat inflasi pada suatu wilayah. Hal ini terlihat dari Keterkaitan Provinsi DKI Jakarta dengan kota-kota di Provinsi Jawa Barat meliputi Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya yang berpengaruh signifikan diduga karena sistem distribusi barang yang digunakan untuk mentransfer barang dan jasa dari wilayah produksi ke kawasan konsumsi.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Selain memberikan kontribusi baru mengenai pembuktian empiris seperti yang dituangkan dalam kesimpulan, penelitian ini juga memiliki implikasi yang mendasari rekomendasi kebijakan yang terkait dengan determinan inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Tingginya inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh sektor non moneter dan moneter sehingga, pemerintah perlu meningkatkan kerjasama antara pemerintah kota, provinsi dan bank sentral dalam mengendalikan inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat meliputi Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Provinsi DKI Jakarta. Bentuk kerjasama meliputi koordinasi dan sinkronisasi secara komperhensif pada kebijakan non moneter dan moneter di pemerintah pusat maupun daerah sehingga proses pengendalian inflasi daerah dapat lebih optimal.
2. Mengingat infrastruktur pendukung distribusi komoditas, seperti jalan dan jumlah armada, memiliki peran yang cukup penting dalam pembentukan harga komoditas inter dan antar wilayah regional, maka perhatian pemerintah melalui instansi terkait terhadap peningkatan infrastruktur melalui koordinasi tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap stabilitas harga melalui efisiensi biaya distribusi.

3. Sejalan dengan temuan pada variabel suku bunga riil yang diduga memberikan pengaruh lebih terhadap kredit konsumsi bila dibandingkan kredit investasi maka pemerintah dan Bank Indonesia perlu memberikan stimulant agar nilai kredit investasi dapat meningkat. Salah satu contohnya adalah kemudahan perijinan usaha dan kebijakan pajak *tax holiday*. Hal ini sangat diperlukan karena peningkatan kredit konsumsi yang sangat tinggi akan menimbulkan *overheating*.
4. Sebagai upaya pengendalian pada sektor moneter terkait dengan tingkat inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat maka Bank Indonesia agar dapat mengoptimalkan fungsi Bank Indonesia (BI) daerah sebagai fasilitator dan katalisator percepatan pembangunan di daerah secara efektif, dengan memperkuat jalinan hubungan dengan Pemerintah Daerah.

5.3. Keterbatasan Studi dan Peluang untuk Penelitian Selanjutnya

1. Kota di Propinsi Jawa Barat yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 kota, dimana Provinsi Jawa Barat memiliki 9 kota dimana terdapat satu kota baru yaitu Kota Banjar yang tidak dimasukkan dalam penelitian dikarenakan adanya keterbatasan runtun data.
2. Penelitian belum membahas seberapa kuat hubungan interaksi wilayah dalam mempengaruhi tingkat inflasi pada daerah sekitarnya.
3. Terkait dengan undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang no. 33/2004 perlu diteliti apakah independensi Bank Sentral dalam mengendalikan inflasi regional sangat diperlukan.
4. Determinan inflasi regional di 2 provinsi lainnya yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada inflasi nasional.
5. Temuan studi bahwa terdapat hubungan endogenitas pada variabel inflasi DKI yaitu kombinasi antara *demand pull* dan *cost push* membuka peluang untuk dapat diteliti mana penyebab inflasi yang lebih kuat antara faktor *demand pull* dan *cost push*.

Daftar Pustaka

- Anton H. Gunawan. (1991). *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Abdul Aleem Khan, Syed Kalim Hyder Bukhari. (2007). *Determinan of recent inflation in Pakistan*. MPRA Paper No. 16254. Pakistan.
- Akinboade O.A., Niedermeier, E.W, & Siebrits, F.K. (2001, September). *South Africa's Inflation Dynamics: Implications for Policy*. Paper presented at The 75th

Anniversary Conference of the Economic Society of South Africa at Glenburn Lodge, Johannesburg.

Aaron Mohrotra. (2007). *Modeling inflation in China, A regional prespective*. Bank of Finland, BOFIT Institute for Economies in Transition.

Akhis R Hutabarat. (2005). *Determinan Inflasi di Indonesia*. Occasional Paper No.06/2005. Jakarta : Bank Indonesia.

Badi H Baltagi. (2005). *Econometric Analysis of Panel Datas* 3rd edition. England: Springer.

Basu Swastha Dh. & Irawan (1997). *Manajemen Pemasaran Moderen Edisi II*. Bandung : Libertry.

Blanchard, D. Oliver. (2003). *Macroeconomics, 3rd edition*. United State of America : Prentice Hall.

Boediono. (1997). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No: 2 ; Ekonomi Makro*, edisi keempat. Yogyakarta : BPFE.

Badan Pusat Statistik. *Daerah Dalam Angka berbagai terbitan tahun 2000 – 2009*. Kota-Kota di Propinsi Jawa Barat.

Bambang PS Brodjonegoro, Telisa Aulia F & Beta Y. Gitaharie (2005). *Determinant factors of regional inflation in decentralized Indonesia*, Economics and Finance Jurnal, Vol.5 no.1. Jakarta : Lembaga Penelitian Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia.

Bambang PS Brodjonegoro. (2001). *Otonomi Daerah dan Kebijakan Fiskal Indonesia*. disampaikan saat seminar Bank Indonesia.

Beta Yulianita G. Laksono. (2005). *Identifikasi jalur mekanisme transmisi dan efektifitas kebijakan moneter dalam mencapai tingkat inflasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah*. Desertasi Fakultas Ekonomi Jakarta : Universitas Indonesia.

Cesar Calderon and Klaus Schmidt.(2009). *What drive inflation in the world*. Washington, DC : The World Bank.

Dornbusch R. & Fisher, S. (1998). *Macro Economics (7th Ed.)*. McGraw Hill. International Editions.

Damodar Gujarati. (1995). *Basic Econometrics.Third Edition*. McGraw Hill International Editions.

David Romer. (2006). *Advanced Macro Economic, 3rd edition*, New York : McGraw-Hill Companies. Inc.

Dorel Ailenei & Cristescu Amalia. (2010). *Regional distribution of inflationary pressure in Rumania*, No. 4/2010. Romanian Journal of Economic Forecasting.

Dalal M.N. & Schacher G. (1988). *Transmission of International Inflation to India : A Structural Analisis*. The Journal of Developing Areas, No. 23, halaman 85-104.

Enrique Alberola & José Manuel Marqués, (1999). *On the relevance and nature of regional inflation differentials : the case of spain*, Documento de Trabajo, No. 9913. Banco de Espana-Servicio de Estudios.

- Frederich S. Mishkin. (1995). *Economics Of Money Banking and Financial Market Fifth Edition*. Harper Collins College Publisher.
- Gregory Mankiw. (2007). *Macro Economic (6th edition)* (Fitria Liza dan Imam Nurmawan, penerjemah). Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Guenter W.Beck, Kristin Hubrich & Massimiliano Maecellino. (2009). *A regional inflation dynamics with in and across euro area countries and a comparison with united state*. Economic Policy Printed in Great Britain.
- Gluschenko Konstantin. (2001). *Inter-regional Variability of Inflation Rates*. Economics Education and Research Consortium. Working Paper No 99/17. Rusia.
- Helena Marques. (2009). *Regional inflation dynamics using space-time models*. Universidad de las Islas Baleares.Spain.
- Heriberta. (1997). *Inflasi dan Pembiayaan Pengeluaran Pemerintah Suatu Analisis dan Aplikasi di Indonesia*, Tesis, Fakultas Ekonomi UI. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Hadi Sasana. (2004). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia dan Filipina*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, vol 11, no 2, 207-220.
- Hartadi Sarwono.(2011). Disampaikan pada Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Jawa Barat – Banten – Jakarta. Jakarta : Bank Indonesia
- Insukrindro. (1995). *Ekonomi Uang dan Bank, Teori dan Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Inoue Takeshi. (2005). *The Determinants of the Inflation Rate in Transition Countries*. vol.42, No.1, Jan. 2005. Japan.
- Jun Nagayasu. (2009). *Regional Inflation in China*. MPRA Paper No. 24722. China.
- Philip Kotler. (1995). *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, terjemahan Ancella Anitawati Hermawan, Edisi VIII. Jakarta : Salemba Empat.
- Matthew B. Canzoneri & E. Cumby Robert, et all. (2006). *New Keynesian Explanations of Cyclical Movements in Aggregate Inflation and Regional Inflation Differentials*. Open economies review 17: 27-55. Netherland : Springer Science Business Media, Inc.
- Muchdarsyah Sinungan. (2002). *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nachrowi D Nachrowi & Hardius Usman. (2006). *Ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nopirin. (1992). *Ekonomi Internasional* edisi 3. Yogyakarta : BPFE .
- Novi Lestari. (2003). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi Pada Perekonomian Regional Indonesia (Studi Kasus 26 Provinsi)*. Tesis, Fakultas Ekonomi UI. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Nuning Trihadmini. (2004). *Analisis Determinan Inflasi di Indonesia Periode 1998 – 2002*. Tesis Fakultas Ekonomi UI. Jakarta : Universitas Indonesia.

- Nugroho J. Prastowo. (2008). *Pengaruh Distribusi dalam Pembentukan Harga komoditas dan Implikasinya Terhadap Inflasi*. Working Paper WP/07/2008. Jakarta : Bank Indonesia.
- Paul A. Samuelson. (1997). *Macro economics, 4th edition*. New York : McGraw-Hill Companies. Inc.
- Rizki E Wimanda. (2006). *Regional Inflation in Indonesia:Characteristic, Convergence, and Determinants*. Working Paper No. WP/13/2006.Jakarta : Bank Indonesia.
- Suwardjoko Warpani. (1990). *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: Penerbit ITB.
- Sara Lemos. (2004). *The Effect of the Minimum Wage on Prices in Brazil*. United Kingdom : University of Leicester and IZA Bonn.
- Sadono Sukirno. (2000). *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka.
- S Djojohadikusumo. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta :LP3ES.
- Syamsurijal. (2008). *Pengaruh produksi beras, stockberas dan infrastruktur jalan dan jembatan terhadap inflasi di Sumatera Selatan*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 6 nomor : 2 Desember 2008.
- Suseno & Piter Abdullah.(2003). *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI. Jakarta : Bank Indonesia.
- Warren J. Keegan. (2003). *Manajemen Pemasaran Global*, Alih Bahasa, Alexander Sindoro dan Tanty Syahlina Tarigan. Prenhalindo: Jakarta.
- William H. Greene. (2003). *Econometric Analysis*.5th edition. New York University : Prentise Hall.
- William .M. Scarth. (1996). *Macroeconomics : an Introduction to Advance Methods, 2nd ed*. International Thomson Publishing.
- Wing W. Winarno. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan EViews*, UPP, STIM YKPN. Yogyakarta.
- Wooldridge. J.M. (2006). *Introductory Econometrics: a modern approach*. 3ed
- Vineris and Sebold. (1977). *Macroeconomics Models and Policy*. New York : John wiley and Sons Inc.

Lampiran Uji

Lampiran Uji Hausman

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang analisa model data panel dimana terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary / common effect*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Pemilihan metode pengujian data panel dilakukan pada seluruh data pertumbuhan pada 10 tahun dan data *cross sectional* sebanyak 8 kota di Provinsi Jawa Barat meliputi Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya.

Pengujian statistik untuk memilih model pertama kali adalah dengan melakukan uji *Chow* untuk menentukan apakah metode *common effect* atau *Fixed Effect* yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel. Dengan hipotesis :

H_0 : Metode *common effect*

H_a : Metode *Fixed effect*

Uji *Chow* dilakukan untuk memilih metode pengujian data panel antara metode *pooled least square* atau *fixed effect*. Jika nilai *F* statistik pada uji *Chow* signifikan, maka metode *fixed effect* lebih tepat digunakan pada model penelitian. Berdasarkan hasil regresi maka diperoleh :

$$F_{hitung} = \frac{(30.53038 - 20.98742) / 8-1}{20.98742 / (72-8-6)} = 3.76$$

$$F_{tabel, (\alpha : 5\%, 7, 58)} = 2.17$$

Sehingga diperoleh kesimpulan $F_{hitung} > F_{tabel}$, dimana H_0 ditolak, yang berarti bahwa *Fixed Efek Model (FEM)* lebih tepat digunakan untuk penelitian ini.

Tahapan kedua dalam pemilihan metode adalah pengujian metode *fixed efek* dan metode *random efek*. Pengujian dilakukan menggunakan *hausman test*, dengan hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : Metode *Random efek*

H_a : Metode *Fixed efek*

Tabel 1.
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.097549	6	0.6635

Sumber : olahan data, 2011

Hasil pengujian dengan metode hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas crossection *random* menunjukkan probability sebesar 0.66 sehingga lebih besar dari α (0.05) adalah signifikan, artinya hasil pengujian menggunakan hausman menunjukkan metode *random efek* yang terpilih.

Namun demikian dengan mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai yaitu melihat determinan inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat, maka penelitian menggunakan metode *fixed effect* agar dapat melihat bagaimana pengaruh tingkat inflasi pada masing-masing kota terobservasi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa pendapat para ahli bahwa jika jumlah time series (T) besar dan jumlah *cross section* (n) kecil, maka nilai taksiran parameter berbeda kecil, sehingga pilihan didasarkan pada teori yang telah diutarakan sebelumnya, yaitu model *fixed effects* (Gujarati, 2003).

Pada bab metodologi telah diutarakan bahwa dalam membentuk model persamaan regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik, guna memperoleh persamaan yang bersifat BLUE karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien. Asumsi utama yang harus dipenuhi ada tiga, yaitu homoskedastisitas, tidak ada multikolinearitas, dan tidak terjadi serial autokorelasi.

Masalah heteroskedastisitas diatasi dengan *White's cross-section standard errors* jika heteroskedastisitas disebabkan oleh variabilitas antarkomponen *cross-section* atau *White's period standard errors* jika disebabkan oleh variabilitas antarwaktu. Jika masalah heteroskedastisitas disebabkan oleh komponen *cross-section* dan *time series* secara bersamaan, maka data diatasi dengan menggunakan pilihan *White's diagonal standard errors* (Widarjono, 2007). Peneliti melakukan pengujian hanya sampai metode individual efek dikarenakan tujuan penelitian yaitu determinan inflasi regional kota-kota di Provinsi Jawa Barat periode 2000-2009 dengan jumlah observasi sebanyak 72 meliputi 8 Kota di Provinsi Jawa Barat dan periode selama 10 tahun dan menggunakan pertumbuhan pada beberapa variabel.

a. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan dengan tahap – tahap penelitian yang dijelaskan pada bagian metodologi, uji asumsi klasik heteroskedastisitas dilakukan pada model. Langkah-langkah uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *white test*. Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : Homoskedastis

H_a : Heteroskedastis

Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas χ^2 sebesar 0.0013, dimana lebih kecil nilai probabilitas dengan α (5%) yang berarti signifikan. Nilai lain yang dilihat

adalah $n \cdot R$ -square sebesar 21.7564 dengan *degree of freedom* sebesar 6 menghasilkan nilai χ^2 tabel sebesar 20.2777 yang berarti kesimpulan yang diperoleh adalah tolak H_0 . Berikut hasil uji heteroskedastis :

Tabel 2.
Hasil Uji Heteroskedastis

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	4.712658	Prob. F(6,64)	0.0005
Obs*R-squared	21.7564	Prob. Chi-Square(6)	0.0013
Scaled explained SS	19.46236	Prob. Chi-Square(6)	0.0035

Sumber : olahan data, 2011

Hal ini mengandung arti bahwa pada data mengandung masalah heteroskedastisitas yang perlu diatasi agar terbebas dari permasalahan heteroskedastisitas.

b. Autokorelasi

Masalah autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan Uji LM Test dengan melihat nilai Durbin-Watson statistic dan nilai probabilitasnya melalui metode *Breusch-Godfrey*. Jika hasil uji LM berada pada hipotesa nol (H_0) yaitu nilai probabilitas *chi squares* (χ^2) pengujian < dari pada nilai *P-value* (5%), maka model estimasi tidak terdapat autokorelasi, begitu pula sebaliknya jika berada pada hipotesa alternatif (H_a) yaitu nilai probabilitas *chi squares* (χ^2) > dari pada nilai kritis *P-value* (5%), maka terdapat autokorelasi. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian untuk pengujian autokorelasi adalah :

H_0 : Tidak ada autokorelasi

H_a : terdapat autokorelasi

Tabel 3.
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Obs*R-squared	29.92723	Prob. Chi-Square(2)	0.00000

Sumber : olahan data, 2011

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari (0.05), menghasilkan keputusan tolak H_0 sehingga dapat disimpulkan data mengandung autokorelasi.

c. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan multikolinier antar variabel independen, dimana penggunaan dua variabel yang memiliki hubungan turunan dalam satu model akan menimbulkan

masalah multikolinieritas. Berikut adalah hasil pengujian multikolinear antara variabel independen :

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinearitas

	GPAD	GLE	SINFRA	GSKRIIL	GUMP	INFDKI
GPAD	1.0000	0.8419	-0.0127	0.1659	0.2360	-0.3391
GLE	0.8419	1.0000	0.0263	0.1829	0.2008	-0.3123
SINFRA	-0.0127	0.0263	1.0000	-0.2633	0.0846	0.2023
GSKRIIL	0.1659	0.1829	-0.2633	1.0000	-0.0909	-0.3742
GUMP	0.2360	0.2008	0.0846	-0.0909	1.0000	-0.1058
INFDKI	-0.3391	-0.3123	0.2023	-0.3742	-0.1058	1.0000

Sumber : olahan data, 2011

Berdasarkan matriks korelasi maka diketahui bahwa tidak terdapat kondisi multikolinearitas antar variabel yang ditunjukkan dengan hasil koefisien korelasi jauh di bawah 1. Hal tersebut didasari dengan melihat *correlation matriks* pada evIEWS dimana apabila nilai *p - value* mendekati 1 maka diduga mengalami multikolinearitas (Winarno, 2007).

d. Endogenitas

Variabel inflasi DKI Jakarta merupakan variabel yang dimasukkan ke dalam model dengan alasan adanya hubungan interaksi spasial antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat baik secara teori maupun kondisi yang didukung dengan laporan-laporan terkait bahwa adanya interaksi antara Provinsi Jawa Barat ke DKI Jakarta. Secara ekonometri hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.
Hasil Uji Endogenitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GPAD?	0.249521	0.588487	0.424005	0.67300
GLE?	0.648377	0.50956	1.272425	0.20780
SINFRA?	-1.138388	0.328608	-3.464273	0.00090
GUMP?	0.568021	0.982792	-0.577966	0.56530
GSKRIIL?	-0.168836	0.330519	-0.51082	0.61120
INFDKI?	-0.597422	0.290046	-2.059746	0.04340
INFDKI?_0	2.375359	0.328971	7.220565	0.00000

Sumber : olahan data, 2011.

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas atas koefisien *fitted value* sebesar (0.000) lebih kecil dari 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi kedua daerah memiliki hubungan saling keterkaitan dimana Inflasi DKI

menyebabkan inflasi Jawa Barat dan Inflasi Jawa Barat menyebabkan inflasi DKI. Setelah diketahui bahwa variabel inflasi DKI mengandung unsur endogen maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian dengan *two stage least square*. Estimator 2SLS (*two stage least square*) dipilih karena dapat mengatasi masalah endogenitas dalam *single equation* (Baltagi, 2002).